



Bupati Bantah Pernyataan

Presiden Jokowi

Anggaran Rp259 Miliar akan Dicairkan



► Ilustrasi.NET

KUBU RAYA-RK. Presiden Joko Widodo menyatakan lebih dari Rp200 triliun uang daerah di seluruh Indonesia masih mengendap di bank daerah masing-masing hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2016.

Tak pelak, pernyataan ini mengundang reaksi keras dari Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali yang membantah pernyataan Pres-

iden Jokowi tersebut. "Tidak ada uang daerah mengendap di bank atau menahan-menahan uang orang," tegas H Rusman Ali, kemarin.

Bahkan, orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya ini menegaskan, pihaknya akan mencairkan anggaran sekitar Rp259 miliar dari kas daerah untuk berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Kubu Raya yang sudah dikerjakan

oleh kontraktor terutama proyek pekerjaan fisik.

"Tentunya uang yang dicairkan ini melihat dari volume pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kontraktor. Kalau pekerjaannya sudah 100 persen maka dibayarkan penuh. Jadi silahkan bisa diambil. Tetapi kalau hanya 50 persen atau 80 persen maka dibayarkan sesuai dengan prosentase pekerjaannya itu," jelasnya.

Sebelum uang itu dicairkan, mantan anggota DPR RI itu mengharapkan, masing-masing SKPD untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pekerjaan yang dilaksanakan tersebut. "Saya tidak mau pekerjaan itu baru 50 persen tapi dicairkan 100 persen. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari," tegas Bupati.

Angka Rp259 miliar itu, disebutkan H Rusman Ali, setelah dipotong melalui opsi-opsi pemangkasan atau penundaan rasionalisasi anggaran yang merupakan imbas dari defisit Dana Alokasi Umum (DAU). "Jadi nilai itu sudah bersih untuk dibayarkan kepada kontraktor," ulasnya.

Sementara itu terkait penundaan DAU, Kabupaten Kubu Raya termasuk satu dari



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 05
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

empat daerah di Provinsi Kalbar yang menjadi sasaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 16 Agustus 2016.

Angkanya mencapai Rp14,2 miliar per bulan. Dengan nilai total selama empat bulan Rp57 miliar. Sementara Provinsi Kalbar Rp67,6 miliar per bulan atau total selama empat bulan mencapai Rp270,4 miliar. Kabupaten Ketapang sebesar Rp41,03 miliar per bulan. Dengan nilai total empat bulan Rp164,12 miliar. Sedangkan Kabupaten Sanggau sebesar Rp15,05 miliar per bulan. Dengan nilai total empat bulan Rp60,2 miliar.

Penundaan DAU ini diberlakukan terhadap 169 daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan total nilai sebesar Rp19,4 triliun selama empat bulan sejak September hingga Desember 2016.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Bambang Ganefo Putra menilai, ditundanya DAU lantaran kelemahan SKPD dalam mengelola anggaran. Sebab, pemerintah pusat melihat saldo daerah masih banyak sehingga berdampak terhadap serapan anggaran yang masih minim. "Kita berharap ini



H Rusman Ali

menjadi pembelajaran ke depannya agar tahun anggaran mendatang tidak kembali terulang," harapnya.

Reporter: Syamsul Arifin
Redaktur: Andry Soe